

Prinsip-Prinsip Al-Akhillā' Qs. Az-Zukhruf: 67 dan Relevansinya dalam Dinamika Perpolitikan: (Perspektif Sepuluh Mufassir dari Klasik Hingga Kontemporer)

Muhammad Iqbal Harun^{1*}, Komarudin Sassi²

^{1,2} Universitas Al-Qur'an Ittifaqiah Indralaya, Jl. Lintas Timur KM. 36, Indralaya Mulia, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
Jalantasik@gmail.com

Abstract

This study examines the principles of al-akhillā' (friendship/companionship) in QS. Az-Zukhruf: 67 and their relevance to contemporary political dynamics based on the perspectives of ten exegetes from the classical to contemporary era. The method employed is maudhūī (thematic) tafsir with a comparative cross-school approach. The findings indicate that al-akhillā' in the verse contains fundamental principles: (1) loyalty is built upon piety, not worldly interests; (2) false friendships end in regret on the Day of Judgment; (3) political relationships not grounded in rabbānī values are transient and destructive. Classical exegetes such as al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, and Ibn Kathīr affirm that true al-akhillā' is friendship that leads to obedience to Allah. Modern exegetes such as Sayyid Quṭb, al-Sha'rāwī, and Ibn 'Ashūr contextualize this verse in the reality of politics that often sacrifices moral values for pragmatism of power. The relevance of this verse in political dynamics is evident in the critique of oligarchy, transactional coalitions, and betrayal of public trust.

Keywords: Al-Akhillā', QS. Az-Zukhruf: 67, Politics, Tafsir, Mufassir

Abstrak

Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip al-akhillā' (persahabatan/pertemanan) dalam QS. Az-Zukhruf: 67 dan relevansinya dalam dinamika perpolitikan kontemporer berdasarkan perspektif sepuluh mufassir dari era klasik hingga kontemporer. Metode yang digunakan adalah tafsir maudhūī (tematik) dengan pendekatan komparatif lintas madzhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-akhillā' dalam ayat tersebut memuat prinsip-prinsip fundamental: (1) loyalitas dibangun di atas nilai ketakwaan, bukan kepentingan duniawi; (2) persahabatan palsu berakhir dengan penyesalan di hari pembalasan; (3) hubungan politik yang tidak berlandaskan nilai-nilai rabbānī bersifat sementara dan merusak. Para mufassir klasik seperti al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, dan Ibn Kathīr menegaskan bahwa al-akhillā' yang sejati adalah persahabatan yang menghantarkan kepada ketaatan kepada Allah. Mufassir modern seperti Sayyid Quṭb, al-Sha'rāwī, dan Ibn 'Ashūr mengkontekstualisasikan ayat ini dalam realitas perpolitikan yang seringkali mengorbankan nilai moral demi pragmatisme kekuasaan. Relevansi ayat ini dalam dinamika perpolitikan tampak dalam kritik terhadap oligarki, koalisi transaksional, dan pengkhianatan kepercayaan publik

Kata Kunci: Al-Akhillā', QS. Az-Zukhruf: 67, Perpolitikan, Tafsir, Mufassir

Copyright (c) 2026 Muhammad Iqbal Harun, Komarudin Sassi

✉Corresponding author: Muhammad Iqbal Harun

Email Address: Jalantasik@gmail.com (Jl. Lintas Timur KM. 36, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumsel)

Received 22 May 2026, Accepted 28 May 2026, Published 03 June 2026

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (ḥablun min Allāh), tetapi juga hubungan manusia dengan sesama (ḥablun min al-nās), termasuk di dalamnya relasi sosial-politik. Salah satu konsep yang memiliki dimensi sosial-politik yang kuat adalah konsep al-akhillā' yang terdapat dalam QS. Az-Zukhruf: 67. Secara leksikal, al-akhillā' merupakan bentuk jamak dari khalīl yang berarti sahabat karib atau teman dekat yang hubungannya meresap ke dalam lubuk hati terdalam (Mubarrak, 2022).

Dalam konteks perpolitikan modern, konsep persahabatan dan koalisi sering kali dibangun di atas kepentingan pragmatis, bukan nilai-nilai moral dan ketakwaan. Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari koalisi transaksional, oligarki kekuasaan, hingga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Al-Qur'an QS. Az-Zukhruf: 67 hadir sebagai kritik teologis terhadap model relasi sosial-politik yang mengedepankan keuntungan duniawi semata (Rachman, 2021).

Kajian tentang ayat ini dari perspektif multi-mufassir sangat relevan mengingat perkembangan tafsir yang beragam dari era klasik hingga kontemporer. Masing-masing mufassir membawa nuansa penafsiran yang berbeda sesuai dengan konteks zamannya, namun tetap dalam bingkai kebenaran wahyu ilahi. Penelitian ini mengkaji secara komparatif penafsiran sepuluh mufassir terhadap QS. Az-Zukhruf: 67 dan menganalisis relevansinya dalam dinamika perpolitikan kontemporer (Hidayat & Suharto, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyentuh tema persahabatan dalam Al-Qur'an, namun belum ada yang secara spesifik mengkaji al-akhillā' dari perspektif sepuluh mufassir sekaligus mengaitkannya dengan dinamika perpolitikan. Aziz (2021) mengkaji konsep al-walāyah dalam Al-Qur'an dan relevansinya dalam konteks kepemimpinan, namun tidak menyentuh dimensi al-akhillā' secara mendalam. Demikian pula Fauzi dan Mujahidin (2022) yang mengkaji etika politik Islam belum menyentuh aspek tafsir tematik dari ayat yang spesifik ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan masyarakat Muslim untuk mendapatkan landasan normatif-qur'ani dalam memahami dan mengevaluasi fenomena politik yang terjadi. Dengan memahami prinsip-prinsip al-akhillā' dari berbagai perspektif mufassir, diharapkan dapat menjadi kontribusi akademis sekaligus praktis dalam membangun budaya politik yang lebih bermartabat dan beradab.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir maudhūī (tematik). Tafsir maudhūī adalah metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian mengkaji secara mendalam dan komprehensif untuk mendapatkan pandangan Al-Qur'an yang utuh tentang tema tersebut (Farmawi, 2002).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir dari sepuluh mufassir yang dipilih secara purposif untuk merepresentasikan berbagai periode dan aliran tafsir, yaitu: (1) al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān*; (2) al-Zamakhsharī dalam *al-Kashshāf*; (3) al-Rāzī dalam *Mafāṭih al-Ghayb*; (4) al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*; (5) Ibn Kathīr dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*; (6) al-Shawkānī dalam *Faṭḥ al-Qadīr*; (7) Sayyid Quṭb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*; (8) Ibn 'Āshūr dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*; (9) al-Sha'rāwī dalam *Tafsīr al-Sha'rāwī*; dan (10) Quraish Shihab dalam *al-Misbah*.

Sumber data sekunder meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan karya akademis lain yang relevan dengan tema penelitian. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dikombinasikan dengan analisis komparatif antar perspektif mufassir. Pendekatan

hermeneutis digunakan untuk mengontekstualisasikan penafsiran dalam realitas perpolitikan kontemporer (Mustaqim, 2019).

HASIL DAN DISKUSI

Teks dan Terjemah QS. Az-Zukhruf: 67

الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

"Teman-teman karib pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa."

Ayat ini terletak pada surah Az-Zukhruf ayat 67, sebuah surah Makkiyyah yang terdiri dari 89 ayat. Ayat ini merupakan bagian dari rangkaian ayat yang menggambarkan kondisi hari kiamat, di mana berbagai hubungan duniawi yang dibangun di atas selain ketakwaan akan berubah menjadi permusuhan dan penyesalan. Kata al-akhillā' (الْأَخْلَاءُ) merupakan isim jama' dari khalīl yang berasal dari akar kata khalla-yukhillu yang maknanya meresap atau menyusup, mengisyaratkan betapa dalamnya hubungan persahabatan tersebut (Nurhayati & Rahmawati, 2022).

Perspektif Mufassir Klasik

Al-Ṭabarī (224-310 H)

Al-Ṭabarī dalam Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān menafsirkan bahwa al-akhillā' pada ayat ini merujuk kepada orang-orang yang menjalin persahabatan di dunia atas dasar kemaksiatan dan kebatilan. Pada hari kiamat, persahabatan tersebut berbalik menjadi permusuhan yang nyata. Al-Ṭabarī mengutip riwayat dari Ibn 'Abbās yang menyatakan bahwa setiap persahabatan yang tidak didasarkan pada ketaatan kepada Allah akan menjadi permusuhan di hari pembalasan. Pengecualian hanya diberikan kepada al-muttaqīn (orang-orang yang bertakwa) yang persahabatannya tetap lestari bahkan hingga di akhirat (Fauzan & Nasution, 2023).

Al-Zamakhsharī (467-538 H)

Al-Zamakhsharī dalam al-Kashshāf memberikan analisis linguistik yang mendalam terhadap kata al-akhillā'. Ia menjelaskan bahwa bentuk jamak af'illā' menunjukkan intensitas hubungan yang sangat erat. Dalam perspektif Mu'tazilahnya, al-Zamakhsharī menekankan dimensi rasional bahwa persahabatan yang tidak berlandaskan kebaikan dan kebenaran secara logis akan berujung pada pertentangan ketika kepentingan bersama tidak lagi ada. Pada hari kiamat, topeng kepura-puraan terlepas dan yang tersisa hanyalah realitas hakiki dari setiap hubungan (Wahid & Muslimin, 2021).

Al-Rāzī (544-606 H)

Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam Mafāṭih al-Ghayb mengembangkan penafsiran ayat ini dari sudut pandang filosofis-teologis. Al-Rāzī mengklasifikasikan persahabatan menjadi tiga kategori: persahabatan karena kesenangan (lazzah), persahabatan karena manfaat (naf'), dan persahabatan karena kebaikan (khayr). Dua kategori pertama bersifat sementara dan akan berakhir bahkan menjadi permusuhan ketika kesenangan dan manfaat tersebut hilang. Hanya persahabatan yang didasarkan pada

kebaikan sejati yang akan abadi. Al-Akhillā' yang dimaksud ayat ini adalah mereka yang menjalin hubungan atas kategori pertama dan kedua (Prihandoko & Maulana, 2022).

Al-Qurṭubī (w. 671 H)

Al-Qurṭubī dalam al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān menafsirkan ayat ini dengan menekankan aspek hukum dan etika sosial. Ia berpendapat bahwa ayat ini merupakan peringatan keras tentang bahaya persahabatan yang dibangun di atas kemaksiatan, yang dalam konteks perpolitikan dapat diartikan sebagai koalisi-koalisi yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Al-Qurṭubī mengutip kisah Abu Jahal dan para pembesar Quraish yang berteman atas dasar kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran Islam, hingga akhirnya hubungan tersebut menjadi permusuhan di akhirat (Zainudin & Kurniawan, 2023).

Ibn Kathīr (701-774 H)

Ibn Kathīr dalam Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm memberikan penafsiran yang kaya dengan dukungan hadis-hadis Nabi. Ibn Kathīr mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Dalam konteks ayat ini, persahabatan yang didasarkan pada kemaksiatan akan membawa bencana bagi kedua belah pihak di hari kiamat. Ibn Kathīr dengan tegas menyatakan bahwa al-akhillā' al-dunyawiyyūn (teman-teman duniawi) yang tidak bertakwa akan menjadi musuh di akhirat, sebagaimana manusia akan menyesal atas semua pilihan dan kecintaan yang tidak didasarkan kepada Allah (Mahmud & Effendi, 2023).

Perspektif Mufassir Modern

Al-Shawkānī (1173-1250 H)

Al-Shawkānī dalam Fath al-Qadīr berada di posisi transisi antara klasik dan modern. Ia menekankan bahwa permusuhan di hari kiamat antara para akhillā' terjadi karena masing-masing pihak akan saling menyalahkan atas kesesatan yang mereka lakukan bersama. Dalam konteks perpolitikan, al-Shawkānī memberikan isyarat bahwa para pemimpin yang saling mendukung dalam kezaliman akan saling melempar tanggung jawab di hadapan pengadilan Allah. Pengecualian bagi al-muttaqīn menunjukkan bahwa hanya persahabatan yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah yang mampu bertahan dalam ujian terbesar sekalipun (Imron & Hidayatullah, 2022).

Sayyid Quṭb (1906-1966 M)

Sayyid Quṭb dalam Fi Zilāl al-Qur'ān memberikan penafsiran yang sarat dengan nuansa gerakan Islam dan kritik terhadap sistem politik yang tidak islami. Ia menegaskan bahwa ayat ini adalah gambaran nyata dari sistem tāghūt yang membangun jaringan kekuasaan di atas fondasi selain Allah. Para politisi yang berkoalisi demi kekuasaan tanpa dasar ketakwaan, pada hakikatnya sedang membangun bom waktu permusuhan yang akan meledak di hari pembalasan. Quṭb melihat fenomena ini dalam realitas dunia Arab yang dikuasai oleh rezim-rezim sekuler yang korup dan saling bersekutu dalam melawan Islam (Khalid & Ismail, 2022).

Ibn 'Āshūr (1879-1973 M)

Ibn 'Āshūr dalam al-Taḥrīr wa al-Tanwīr menganalisis ayat ini dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah. Ia berpendapat bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga relasi sosial yang sehat dan benar, termasuk dalam ranah politik. Persahabatan yang tidak berlandaskan nilai-nilai syariat akan melanggar maqāṣid tersebut dan pada akhirnya akan hancur. Ibn 'Āshūr mengkontekstualisasikan ayat ini dalam dinamika penjajahan Barat di dunia Muslim, di mana koalisi para penguasa Muslim dengan penjajah demi mempertahankan kekuasaan mereka adalah contoh nyata dari al-akhillā' yang akan menjadi permusuhan (Basri & Arifin, 2023).

Al-Sha'rāwī (1911-1998 M)

Al-Sha'rāwī dalam Tafsīr al-Sha'rāwī menyampaikan penafsiran yang populis dan mudah dipahami masyarakat. Ia menggambarkan bahwa di hari kiamat, para mantan teman yang bersekutu dalam kemaksiatan akan saling meratapi nasib mereka dan menyalahkan satu sama lain. Dalam gaya khas ceramahnya, al-Sha'rāwī memberikan analogi yang sangat relevan dengan kehidupan politik: seperti dua politisi yang berkoalisi dalam korupsi, kemudian ketika kejahatan mereka terungkap, mereka saling menikam dari belakang. Demikianlah gambaran al-akhillā' di hari kiamat. Namun orang-orang bertakwa tetap menjadi sahabat yang saling mendukung (Salim & Bakar, 2023).

Quraish Shihab (1944 M -)

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah memberikan penafsiran yang kontekstual dalam realitas masyarakat Muslim Indonesia. Ia menjelaskan bahwa al-akhillā' yang menjadi musuh pada hari kiamat adalah mereka yang bersahabat atas dasar kejahatan bersama. Kata khalīl sendiri bermakna teman yang meresap ke lubuk hati, namun jika dasar persahabatan itu adalah kemaksiatan, maka keamatan tersebut justru mempererat jerat azab yang akan mereka tanggung bersama. Dalam konteks Indonesia, Shihab mengkritik fenomena partai politik yang berkoalisi semata-mata untuk pembagian kekuasaan tanpa visi keummatan yang jelas (Nashir & Suyadi, 2021).

Analisis Komparatif Perspektif Mufassir

Dari telaah terhadap sepuluh mufassir di atas, dapat diidentifikasi beberapa titik kesepakatan dan perbedaan nuansa dalam penafsiran QS. Az-Zukhruf: 67. Secara garis besar, seluruh mufassir sepakat bahwa:

1. Al-akhillā' yang dimaksud adalah persahabatan yang dibangun di atas selain ketakwaan;
2. Persahabatan tersebut akan berakhir dengan permusuhan di hari kiamat;
3. Pengecualian hanya berlaku bagi orang-orang bertakwa.

Perbedaan terletak pada penekanan dan kontekstualisasi. Mufassir klasik (al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, Ibn Kathīr) cenderung menekankan dimensi eskatologis dan menggali riwayat-riwayat penafsiran dari sahabat dan tabi'in. Mufassir pertengahan (al-Zamakhsharī, al-Rāzī, al-Shawkānī) mengembangkan analisis linguistik, filosofis, dan teologis yang lebih sistematis. Sementara mufassir kontemporer (Sayyid Quṭb, Ibn 'Āshūr, al-Sha'rāwī, Quraish Shihab) dengan kuat mengkontekstualisasikan ayat ini dalam realitas sosial-politik masa kini (Rahmat & Hakim, 2022).

Relevansi Prinsip Al-Akhillā' dalam Dinamika Perpolitikan

Kritik Terhadap Koalisi Transaksional

Prinsip pertama yang dapat diekstrak dari penafsiran para mufassir adalah bahwa koalisi atau persekutuan politik yang dibangun di atas kepentingan transaksional semata bagi-bagi kekuasaan, proyek, dan jabatan adalah representasi modern dari al-akhillā' yang tercela dalam QS. Az-Zukhruf: 67. Penelitian Muazir dan Sholihah (2022) menunjukkan bahwa koalisi-koalisi semacam ini terbukti rentan terhadap perpecahan ketika kepentingan masing-masing pihak tidak terakomodasi. Hal ini selaras dengan gambaran Al-Qur'an tentang perubahan persahabatan menjadi permusuhan ketika fondasi bersama telah goyah.

Bahaya Oligarki Politik

Mufassir seperti Sayyid Quṭb dan Ibn 'Āshūr secara eksplisit mengkritik jaringan kekuasaan yang dibangun di atas kepentingan kelompok kecil yang mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Dalam terminologi ilmu politik modern, fenomena ini disebut oligarki. Studi Hadiz dan Robison (2013) tentang oligarki di Indonesia menunjukkan bagaimana jaringan persahabatan elite politik dan ekonomi membentuk struktur kekuasaan yang sulit ditembus. Prinsip al-akhillā' dalam Al-Qur'an mengajarkan bahwa jaringan semacam ini hanya akan bertahan selama kepentingan bersama terpenuhi, dan akan hancur ketika tidak (Kurniawan & Santoso, 2023).

Etika Loyalitas Politik

Dari perspektif mufassir, loyalitas yang sejati dalam konteks politik harus dibangun di atas komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan public bukan sekadar loyalitas personal kepada pemimpin. Pengecualian bagi al-muttaqīn mengisyaratkan bahwa loyalitas politik yang bermartabat adalah yang menghantarkan kepada kebaikan bersama. Penelitian Huda (2022) tentang etika politik Islam menunjukkan bahwa konsep walā' (loyalitas) dalam Islam memiliki hierarki yang jelas: kepada Allah, Rasul, kemudian pemimpin yang adil. Korupsi dalam hierarki loyalitas inilah yang menjadi akar dari banyak problema politik.

Persahabatan Politik yang Berkualitas

Aspek positif dari ayat ini adalah pengecualian bagi al-muttaqīn yang menunjukkan bahwa persahabatan dan aliansi politik yang berkualitas adalah mungkin dan bahkan diperintahkan. Persahabatan politik yang dibangun di atas nilai-nilai ketakwaan kejujuran, amanah, keadilan, dan pengabdian kepada public akan membentuk fondasi yang kokoh dan tahan uji. Nilai-nilai ini relevan dengan konsep modal sosial (social capital) dalam teori politik kontemporer yang diteliti oleh Putnam, di mana kepercayaan dan norma reciprocity menjadi fondasi dari tatanan politik yang sehat (Pratama & Wahyuningsih, 2023).

Implikasi terhadap Pendidikan Politik Berbasis Nilai

Kajian tentang prinsip al-akhillā' juga memiliki implikasi penting bagi pendidikan politik berbasis nilai Islam. Mukhtar dan Hasibuan (2023) dalam penelitian mereka tentang pendidikan politik Islam menekankan perlunya internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam pembentukan karakter politisi Muslim. QS. Az-Zukhruf: 67 dapat menjadi landasan normatif untuk mengajarkan kepada generasi

muda Muslim tentang bahaya persekutuan yang tidak bermoral dan pentingnya membangun relasi politik yang berdasarkan ketakwaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap sepuluh perspektif mufassir dari era klasik hingga kontemporer atas QS. Az-Zukhruf: 67, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Al-akhillā' dalam QS. Az-Zukhruf: 67 merujuk kepada persahabatan dan aliansi yang dibangun di atas selain ketakwaan kepada Allah. Seluruh mufassir sepakat bahwa persahabatan semacam ini akan berakhir dengan permusuhan di hari kiamat, sebagai manifestasi dari keadilan ilahi yang mengungkap hakikat setiap hubungan.
2. Terdapat perkembangan penafsiran yang signifikan dari era klasik ke kontemporer. Mufassir klasik menekankan dimensi eskatologis dan riwayat, mufassir pertengahan mengembangkan analisis linguistik dan filosofis, sementara mufassir kontemporer secara aktif mengkontekstualisasikan ayat dalam realitas sosial-politik.
3. Relevansi prinsip al-akhillā' dalam dinamika perpolitikan kontemporer sangat nyata: sebagai kritik terhadap koalisi transaksional yang tidak berlandaskan nilai moral; sebagai peringatan terhadap bahaya oligarki politik; sebagai panduan etika loyalitas politik yang bermartabat; dan sebagai landasan normatif untuk pendidikan politik berbasis nilai Islam.

Penelitian ini merekomendasikan agar para politisi Muslim menjadikan prinsip-prinsip al-akhillā' dalam Al-Qur'an sebagai cermin introspeksi dalam membangun relasi dan aliansi politik. Selanjutnya, diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji lebih mendalam ayat-ayat terkait dalam perspektif tafsir sosial-politik (tafsir ijtimā'ī-siyāsī) untuk membangun kerangka teori politik Islam yang komprehensif.

REFERENSI

- Aziz, A. (2021). Konsep *al-walāyah* dalam Al-Qur'an dan relevansinya dalam kepemimpinan Islam kontemporer. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 17(2), 145–168.
- Basri, H., & Arifin, Z. (2023). *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam perspektif Ibn 'Āshūr dan implikasinya terhadap politik Islam. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 7(1), 78–99.
- Fauzan, R., & Nasution, M. H. (2023). Al-Ṭabarī dan metodologi tafsir riwayat: Kajian atas *Jāmi' al-bayān*. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 8(2), 112–135.
- Fauzi, A., & Mujahidin, A. (2022). Etika politik Islam: Antara idealisme normatif dan realisme pragmatis. *Jurnal Politik Islam*, 5(1), 23–47.
- Farmawi, A. H. (2002). *Metode tafsir mawdu'iy: Suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, N., & Suharto, T. (2023). Tafsir komparatif: Metodologi dan aplikasinya dalam kajian Al-Qur'an kontemporer. *Jurnal Ushuluddin*, 25(1), 56–79.
- Huda, M. (2022). Konsep *walā'* dalam Islam dan implikasinya terhadap etika politik Muslim. *Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 201–225.

- Imron, A., & Hidayatullah, S. (2022). Al-Shawkānī dan metodologi tafsir integratif: Antara *naql* dan *'aql*. *Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 89–108.
- Khalid, M., & Ismail, F. (2022). Sayyid Quṭb dan tafsir siyāsī: Pembacaan kontekstual atas *Fī Zilāl al-Qur'ān*. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 9(1), 34–58.
- Kurniawan, D., & Santoso, B. (2023). Oligarki dan demokrasi: Kajian kritis terhadap struktur kekuasaan politik Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 11(1), 67–91.
- Mahmud, A., & Effendi, R. (2023). Ibn Kathīr dan metodologi tafsir hadis: Kajian atas *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. *Jurnal Hadis dan Ilmu Hadis*, 6(1), 45–68.
- Muazir, A., & Sholihah, U. (2022). Koalisi transaksional dan fragmentasi demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 115–139.
- Mukhtar, H., & Hasibuan, A. (2023). Pendidikan politik berbasis nilai-nilai Al-Qur'an: Perspektif tafsir tematik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 78–99.
- Mubarrak, H. (2022). Semantik Al-Qur'an: Kajian atas kosakata relasi sosial dalam Al-Qur'an. *Jurnal Linguistik Islam*, 5(1), 23–45.
- Mustaqim, A. (2019). *Metode penelitian Al-Qur'an dan tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.
- Nashir, H., & Suyadi, S. (2021). Quraish Shihab dan tafsir kontekstual Indonesia: Kajian atas *Tafsir al-Misbah*. *Jurnal Tarjih*, 18(2), 155–179.
- Nurhayati, N., & Rahmawati, R. (2022). Analisis semantik kata *al-akhillā'* dalam Al-Qur'an: Pendekatan linguistik historis. *Jurnal Bahasa Arab dan Linguistik*, 7(1), 34–57.
- Pratama, A., & Wahyuningsih, S. (2023). Modal sosial dan demokrasi: Perspektif Islam dan teori kontemporer. *Jurnal Sosial Politik*, 9(2), 145–169.
- Prihandoko, B., & Maulana, R. (2022). Al-Rāzī dan epistemologi tafsir: Antara filsafat dan teologi dalam *Mafāṭīḥ al-ghayb*. *Jurnal Kalam*, 16(1), 67–90.
- Rachman, T. (2021). Kritik Al-Qur'an terhadap pragmatisme politik: Kajian tematik. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 14(2), 189–211.
- Rahmat, F., & Hakim, L. (2022). Perkembangan metodologi tafsir dari klasik ke kontemporer: Sebuah kajian historis. *Jurnal At-Tibyan*, 7(1), 45–68.
- Salim, A., & Bakar, A. (2023). Al-Sha'rāwī dan tafsir populer: Kontribusi dan kritik. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 34(1), 78–101.
- Wahid, A., & Muslimin, M. (2021). Al-Zamakhsharī dan tradisi tafsir Mu'tazilah: Kajian atas *al-Kashshāf*. *Jurnal Pemikiran Islam*, 17(1), 89–112.
- Zainudin, M., & Kurniawan, H. (2023). Al-Qurtūbī dan fiqh Al-Qur'an: Kontribusi metodologis dalam tafsir hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 5(2), 134–157.